



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR *41/243* TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA DAHIAN TUNGGAL
DI KECAMATAN PULAU MALAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Pulau Malan perlu diangkat dan ditetapkan Damang Kepala Adat di Kecamatan Pulau Malan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dahian Tunggal Nomor : 285/PEMDES/DDT-PM/XII/2022 a.n. Sudirman Sahadan tanggal 8 Desember 2022, dan Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 020/DAD-KAT/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Handwritten signature/initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

k
m
ed

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA DAHIAN TUNGGAL DI KECAMATAN PULAU MALAN.
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Dahian Tunggal di Kecamatan Pulau Malan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Pulau Malan yaitu selama 4 (empat) tahun terhitung dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA** : Kepada Damang Kepala Adat di Kecamatan Pulau Malan diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap Tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT** : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/174 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Dahian Tunggal di Kecamatan Pulau Malan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

h k
ef

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Maret 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 26 Mei 2023

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. : a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Pulau Malan di Buntut Bali.

hr
ef

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 111/2023 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT
DESA DAHIAN TUNGGAL DI KECAMATAN
PULAU MALAN

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	MARDI	MANTIR ADAT DAHIAN TUNGGAL	MANTIR ADAT DAHIAN TUNGGAL	PULAU MALAN	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Kecamatan Pulau Malan Nomor : 01/DAD-KPM/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 13/DAD-KAT/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Pulau Malan
2.	ERENDIE	MANTIR ADAT DAHIAN TUNGGAL	MANTIR ADAT DAHIAN TUNGGAL	PULAU MALAN	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 020 /DAD-KAT/IV/2023 Hal Rekomendasi Pergantian antar waktu Mantir Adat Desa Dahian Tunggal Kec. Pulau Malan, tanggal 12 April 2023
3.	TEDY	-	MANTIR ADAT DAHIAN TUNGGAL	PULAU MALAN	- Yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 285/PEMDES/DDT-PM/XII/2022 a.n. SUDIRMAN SAHADAN dari Kepala Desa Dahian Tunggal tanggal 8 Desember 2022
4.	SUDIRMAN SAHADAN	MANTIR ADAT DAHIAN TUNGGAL	-	PULAU MALAN	- Yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 285/PEMDES/DDT-PM/XII/2022 a.n. SUDIRMAN SAHADAN dari Kepala Desa Dahian Tunggal tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KATINGAN,


SAARIYAS

lm
Q